

6.2 MATRIK PERSANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS  
PEMBANGUNAN DAERAH DAN NASIONAL PADA RKPD TAHUN 2024

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	NAWABHAKTI	PROGRAM ICON	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SUMBER PENDANAAN	PAGU ANGGARAN RANWAL	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing Ketenagakerjaan serta pengentasan Kemiskinan	Pengentasan Kemiskinan (PP6)	Bhakti - 1 : Jatim Sejahtera. "Mengentaskan kemiskinan Menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial"	Program Keluarga Harapan Plus	PKH Plus merupakan program pemberian bantuan bersyarat kepada Lanjut Usia yang berada dalam keluarga PKH	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Facilitasi bantuan sosial kesejahteraan Keluarga	PAD	110.000.000.000	Dinas Sosial	
	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing Ketenagakerjaan serta pengentasan Kemiskinan	Pengentasan Kemiskinan (PP6)		Pengurangan beban 26 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Pemenuhan kebutuhan Dasar PPKS (pereru pelayanan kesejahteraan sosial) di Dalam Panti Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur	Program Rehabilitasi Sosial	-Rehabilitasi Sosial Disabilitas Terlantar Didalam Panti -Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Didalam Panti -Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar Didalam Panti -Rehabilitasi Sosial Gelandangan Terlantar Didalam Panti -Rehabilitasi Sosial PMKS Terlantar Didalam Panti -Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Didalam Panti	-Penyediaan Permakanan -Penyediaan Sandang -Paket Bimbingan Sosial -Perbekalan Kesehatan -penelusuran keluarga -reuntikasi keluarga  -Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan	PAD	88.400.000.000	Dinas Sosial	
	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing Ketenagakerjaan serta pengentasan Kemiskinan	Pengentasan Kemiskinan (PP6)		Jatim Satya (Jawa Timur Sejahtera dan Mulya) : Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan	Pemberian bantuan modal usaha kepada perempuan produktif	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pelaksanaan Pengusutan Urusan / Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	PAD	1.150.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
												Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
												Dinas Kelautan dan Perikanan	
												Dinas Peternakan	
												Dinas Peternakan	
												Dinas Perkebunan	
						Bantuan sarana prasarana produksi berupa benih ikan, kolam wadah budidaya ikan	#REF!	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/ atau Manfaat atau Dampak Nyata/linya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PAD	2.206.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing Ketenagakerjaan serta pengentasan Kemiskinan	Pengentasan Kemiskinan (PP6)	Bhakti - 1 : Jatim Sejahtera. "Mengentaskan kemiskinan Menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial"	Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD)	Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) merupakan program pemberian bantuan bersyarat kepada Disabilitas di luar panti yang tidak mampu dan masuk dalam aplikasi e-disabilitas	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Facilitasi bantuan sosial kesejahteraan Keluarga	PAD	14.400.000.000	Dinas Sosial	
							Program Pelayanan Penghubung	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	PAD		Bakorwil III Malang	
	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi Di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6)	Bhakti - 2 : Jatim Kerja. "Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun keunggulan Ekonomi"	Millennial Job Center	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Program Pelayanan Penghubung	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	PAD	725.000.000	Bakorwil IV Pamekasan	
	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi Di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6)	Bhakti - 2 : Jatim Kerja. "Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun keunggulan Ekonomi"	Millennial Job Center	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Program Pelayanan Penghubung	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	PAD	745.000.000	Bakorwil V Jember	
					Service point, Pelatihan, Investasi, Co-working space dan pemberdayaan masyarakat	Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Perijinan dan Non Perijinan (Service Point & EJSC)	Program Pelayanan Penghubung	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	PAD	50.000.000	Bakorwil I Madiun	
							Program Pelayanan	Pelaksanaan Pelayanan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan	PAD		Bakorwil II	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	NAWABHAKTI	PROGRAM ICON	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SUMBER PENDANAAN	PAGU ANGGARAN RANWAL	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
							Penghubung	Penghubung	Pelayanan Penghubung			Bojonegoro	
							Program Pelayanan Penghubung	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	PAD		Bakorwil III Malang	
	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PNI)	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi Di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6)	Bhakti - 2 : Jatim Kerja. "Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun keunggulan Ekonomi"	Service point, Pelatihan, Investasi, Co-working space dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Program Pelayanan Penghubung	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	PAD	725.000.000	Bakorwil IV Pamekasan	
	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PNI)	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi Di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6)	Bhakti - 2 : Jatim Kerja. "Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun keunggulan Ekonomi"	Service point, Pelatihan, Investasi, Co-working space dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Program Pelayanan Penghubung	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	PAD	745.000.000	Bakorwil V Jember	
						Implementasi LKPM Online bagi PMDN dan UKM	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	PAD	1.173.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
					Science Techno Park Dream Team							Dinas Pendidikan	
												Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (UPT PAITPH - BLUD)	
						Pelatihan kerja di 16 UPT BLK	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	PAD	25.827.572.349	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Pelatihan intensif 480 jam 16 UPT BLK	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	PAD		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Job Market Fair	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/ Bursa Kerja	PAD	2.413.521.785	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Revitalisasi UPT BLK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PAD	1.616.044.084	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
							PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	PAD	291.729.045.500	Dinas Pendidikan	
								Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	PAD	658.871.395.300	Dinas Pendidikan	
								Pengelolaan Pendidikan Khusus	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	PAD	18.167.709.200	Dinas Pendidikan	
						Peningkatan Kualitas Sarpras Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penambahan Ruang Kelas Baru	PAD	8.135.280.921	Dinas Pendidikan	
									Pembangunan Perpustakaan Sekolah	PAD	80.116.652	Dinas Pendidikan	
									Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	PAD	1.060.829.174	Dinas Pendidikan	
									Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Laboratorium IPA	PAD	132.079.493	Dinas Pendidikan	
									Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	PAD	6.244.779.457	Dinas Pendidikan	
									Pengadaan Mebel Sekolah	PAD	287.965.873	Dinas Pendidikan	
									Pengadaan Perlengkapan Sekolah	PAD	599.739.704	Dinas Pendidikan	
								Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	PAD	14.135.572.872	Dinas Pendidikan	
									Penambahan Ruang Kelas Sekolah	PAD	1.124.919.070	Dinas Pendidikan	
									Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	PAD	1.690.949.720	Dinas Pendidikan	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	NAWABHAKTI	PROGRAM ICON	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SUMBER PENDANAAN	PAGU ANGGARAN RANWAL	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	PAD	225.611.321	Dinas Pendidikan	
									Pembangunan Perpustakaan Sekolah	PAD	225.611.321	Dinas Pendidikan	
									Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	PAD	1.587.025.109	Dinas Pendidikan	
									Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	PAD	252.631.269	Dinas Pendidikan	
									Pembangunan Fasilitas Parkir	PAD	236.004.103	Dinas Pendidikan	
									Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	PAD	10.628.472.641	Dinas Pendidikan	
									Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	PAD	274.975.430	Dinas Pendidikan	
									Pengadaan Mebel Sekolah	PAD	51.990.501.859	Dinas Pendidikan	
									Pengadaan Perlengkapan Sekolah	PAD	1.264.858.496	Dinas Pendidikan	
									Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	PAD	5.302.332.341	Dinas Pendidikan	
								Pengelolaan Pendidikan Khusus	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	PAD	846.031.079	Dinas Pendidikan	
									Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	PAD	2.775.195.865	Dinas Pendidikan	
									Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	PAD	2.219.707.965	Dinas Pendidikan	
									Pengadaan Mebel Sekolah	PAD	825.256.226	Dinas Pendidikan	
									Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	PAD	1.690.949.720	Dinas Pendidikan	
									Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	PAD	1.183.796.507	Dinas Pendidikan	
				Bhakti - 3 : Jatim Cerdas dan Sehat. "Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar berkualitas."	Program Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniviah dan Guru Swasta (BPPDCS) atau BOSDA MADIN	Memberikan bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan mendasar dan pokok bagi Santri/Warga Belajar/Siswa Madrasah Diniviah Takmiliah Ula/Wustho, Paket A/B dan Paket A/B Pondok Pesantren, Ustadz/Guru Madrasah Diniviah Takmiliah Ula/Wustho dan Guru Swasta SD/MI/Salafiyah Ula/SMP/MTs/Salafiyah Wustho Swasta dan Guru SMP Satu Atap/MTs Satu Atap	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	PAD	200.456.190.000	Dinas Pendidikan	
				Bhakti - 3 : Jatim Cerdas dan Sehat. "Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar berkualitas."	Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD NON PNS	Pemberian Personal Penerima Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	PAD	7.524.000.000	Dinas Pendidikan	
				Bhakti - 3 : Jatim Cerdas dan Sehat. "Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar berkualitas."	Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang TK/SD/SMP	Pemberian Personal Penerima Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang TK/SD/SMP	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	PAD	4.270.000.000	Dinas Pendidikan	
					BOSDA MADIN								
					Revitalisasi SMK melalui Sekolah Pengampu	Pembentukan sekolah pengampu dalam bentuk pembangunan laboratorium/studio praktik bersama	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	PAD	5.302.332.341	Dinas Pendidikan	
					Double Track	Tambahan Keterampilan bagi Siswa SMA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	PAD	39.628.048.317	Dinas Pendidikan	
					Peningkatan Kesejahteraan dan Kompetensi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap	Pemberian tambahan kesejahteraan GTT dan PTT	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	PAD	76.711.996.101	Dinas Pendidikan	
									Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	PAD	89.841.634.513	Dinas Pendidikan	
									Pengelolaan Pendidikan Khusus	PAD	3.611.373.513	Dinas Pendidikan	
					Beasiswa untuk SMK jurusan prioritas (kelautan, teknologi pertanian, pariwisata)	Memberikan Beasiswa kepada siswa yang akan mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Jurusan Prioritas yaitu Kelautan, Teknologi Pertanian dan Pariwisata.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	PAD	11.161.147.194	Dinas Pendidikan	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	NAWABHAKTI	PROGRAM ICON	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SUMBER PENDANAAN	PAGU ANGGARAN RANWAL	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
					MILEA	Memberikan tambahan ketrampilan bagi siswa SMK dan Guru SMK	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	PAD	10.817.434.904	Dinas Pendidikan	
					Pendidikan Kesetaraan berbasis vokasi (kejar paket)	Memberikan tambahan ketrampilan bagi siswa yang mengikuti program kejar Paket	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	PAD	5.000.000.000	Dinas Pendidikan	
					Pesantren Pengasuhan Anak Masa Depan (Pesan Aman)	program pengasuhan yang menasar anak-anak dari keluarga petani dan nelayan miskin serta yatim piatu yang selama ini tidak hanya tidak bisa mengakses pendidikan berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	PAD	-	Dinas Pendidikan	
					SMA Pengimbas	Memberikan bantuan sarana prasarana bagi SMA Pengimbas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	PAD	599.739.704	Dinas Pendidikan	
					SMA Boarding	Pembangunan asrama, sarana prasarana asrama.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	PAD	39.628.048.317	Dinas Pendidikan	
					Program Desa Sehat (Pelayanan Kesehatan Desa melalui Puskesmas dan Dokter Umum Di Puskesmas Sesuai Standar)	Honorarium Perawat Puskesmas dan Honorarium Dokter Umum di Puskesmas Sesuai Standart	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	PAD	45.184.000.000	Dinas kesehatan	
					Penyediaan pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas (TANTISTAS)	Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI Masyarakat Miskin (Biakesmaskin)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	PAD		Dinas kesehatan	
					Perluasan akses dan penguatan fasilitas kesehatan	Penempatan dokter umum di puskesmas sangat terpencil melalui pemberian Honor Dokter Umum Puskesmas kepulauan di Sumenep	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	PAD	1.188.000.000	Dinas kesehatan	
					Pemenuhan redistribusi tenaga kesehatan terutama di wilayah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan bahari husada (rumah sakit terapan)	Pemberian Honor untuk Kunjungan Pelayanan Kesehatan (Tim Dokter Spesialis) Di Kepulauan Dan Koridor Madura, Kunjungan dokter spesialis/dokter resident senior ke daerah kepulauan atau koridor madura	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	PAD	725.203.000	Dinas kesehatan	
					Konseling dari pintu ke pintu (KOP1PU)	Kunjungan konseling kesehatan (bidan, perawat puskesmas dan ormas) memberikan Bantuan Transport Perawat Puskesmas dan Pendampingan Konseling	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	PAD	3.166.393.500	Dinas kesehatan	
					Santri Jatim Sehat Dan Berkah (SAJADAH)	Pendampingan Poskestren *)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	PAD	1.309.194.000	Dinas kesehatan	
					Bunda Anak Impian (BUAIAN)	Pendampingan Bumil Risti dan Pendampingan Pencegahan Stunting Bagi Ibu Hamil	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	PAD	2.390.415.000	Dinas kesehatan	
					Penguatan RSU dan RSUD Rujukan di 5 Koridor							RUMAH SAKIT PARU JEMBER	
												RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN	
												RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAIFUL ANWAR	
												RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADILIN	
												RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	NAWABHAKTI	PROGRAM ICON	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SUMBER PENDANAAN	PAGU ANGGARAN RANWAL	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
													RUMAH SAKIT JAWA MENUR Dinas Kesehatan
						Optimalisasi pemenuhan ruang laktasi, ramah anak dan disabilitas di perkantoran, sekolah, dan berbagai ruang publik yang lain.							
						Penguatan Pengarusutamaan gender untuk mewujudkan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak dan Penguatan SDM Fasilitator Pengarusutamaan gender		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	APBD	564.138.000	DP3AK	
						Peningkatan SDM dalam pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	APBD	360.934.000	DP3AK	
	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder	Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (PP2)	<b>Bhakti - 4 : Jatim Akses.</b>	- Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional - Penanganan desa rawan kekeringan	- Pengembangan SPAM Umbulan - Penyajian SPAM regional Probolinggo-Lumajang (Probolajang)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	PAD	17.167.500.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	
	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	Peningkatan kemandirian pangan, dam pengelolaan sumber daya energi	Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1)						Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	PAD	279.030.772.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	
									Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	PAD	26.000.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	
									Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	PAD	450.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	
	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Pembangunan Wilayah Jawa-Bali (PP2)	<b>Bhakti - 4 : Jatim Akses.</b>	Penyediaan Akses Sanitasi Layak	Fasilitasi kerjasama TPA Regional	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan persampahan TPA/IPST/SPA Kewenangan provinsi	PAD	1.925.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	
	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	Peningkatan kemandirian pangan, dam pengelolaan sumber daya energi	Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1)						Penyediaan sarana dan prasarana persampahan	PAD	48.300.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	
									Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	PAD	1.000.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	
									Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	PAD	100.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	
						Jumlah rumah tangga terlayani akses sanitasi	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	PAD	1.125.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	
									Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	PAD	1.000.000.000	Dinas Perumahan	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	NAWABHAKTI	PROGRAM ICON	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SUMBER PENDANAAN	PAGU ANGGARAN RANWAL	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
												Rakyat, Kawasan Permukiman dan CiptaKarya	
									Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	PAD	150.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	
							Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	PAD	450.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	
									Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	PAD	2.500.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	
	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	Peningkatan kemandirian pangan, dam pengelolaan sumber daya energi	Infrastruktur Ekonomi (PP2)	Bhakti 4 - Jatim Akses	Pengembangan & Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)	Operasi 176 Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Provinsi dengan Total Luasan 164.823 Ha dan Pemeliharaan Daerah Irigasi dengan Tingkat Kerusakan < 40%, serta Rehabilitasi Daerah Irigasi dengan Tingkat Kerusakan > 40%.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1.000 Ha - 3.000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	PAD	290.954.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	
	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	Peningkatan kemandirian pangan, dam pengelolaan sumber daya energi	Infrastruktur Ekonomi (PP2)	Bhakti 4 - Jatim Akses	Pengembangan & Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)	Operasi 176 Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Provinsi dengan Total Luasan 164.823 Ha dan Pemeliharaan Daerah Irigasi dengan Tingkat Kerusakan < 40%, serta Rehabilitasi Daerah Irigasi dengan Tingkat Kerusakan > 40%.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1.000 Ha - 3.000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Bendung Irigasi	PAD	11.454.932.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	
	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	Peningkatan kemandirian pangan, dam pengelolaan sumber daya energi	Infrastruktur Ekonomi (PP2)	Bhakti 4 - Jatim Akses	Pengembangan & Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)	Operasi 176 Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Provinsi dengan Total Luasan 164.823 Ha dan Pemeliharaan Daerah Irigasi dengan Tingkat Kerusakan < 40%, serta Rehabilitasi Daerah Irigasi dengan Tingkat Kerusakan > 40%.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1.000 Ha - 3.000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	PAD	49.391.683.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	
	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	Peningkatan kemandirian pangan, dam pengelolaan sumber daya energi	Infrastruktur Ekonomi (PP2)	Bhakti 4 - Jatim Akses	Pengembangan & Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)	Operasi 176 Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Provinsi dengan Total Luasan 164.823 Ha dan Pemeliharaan Daerah Irigasi dengan Tingkat Kerusakan < 40%, serta Rehabilitasi Daerah Irigasi dengan Tingkat Kerusakan > 40%.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1.000 Ha - 3.000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	PAD	4.653.264.500	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	
	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	Peningkatan kemandirian pangan, dam pengelolaan sumber daya energi	Infrastruktur Ekonomi (PP2)	Bhakti 4 - Jatim Akses	Penanganan Banjir	Pemantauan Banjir, Operasi dan Pemeliharaan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	PAD	581.294.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	
	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	Peningkatan kemandirian pangan, dam pengelolaan sumber daya energi	Infrastruktur Ekonomi (PP2)	Bhakti 4 - Jatim Akses	Penanganan Banjir	Pemantauan Banjir, Operasi dan Pemeliharaan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	PAD	140.461.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	
	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	Peningkatan kemandirian pangan, dam pengelolaan sumber daya energi	Infrastruktur Ekonomi (PP2)	Bhakti 4 - Jatim Akses	Penanganan Banjir	Pemantauan Banjir, Operasi dan Pemeliharaan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	PAD	290.954.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	
	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	Peningkatan kemandirian pangan, dam pengelolaan sumber daya energi	Infrastruktur Ekonomi (PP2)	Bhakti 4 - Jatim Akses	Penanganan Banjir	Pemantauan Banjir, Operasi dan Pemeliharaan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	PAD	2.006.502.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	
	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	Peningkatan kemandirian pangan, dam pengelolaan sumber daya energi	Infrastruktur Ekonomi (PP2)	Bhakti 4 - Jatim Akses	Penanganan Banjir	Pemantauan Banjir, Operasi dan Pemeliharaan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	PAD	1.755.757.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	
	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	Peningkatan kemandirian pangan, dam pengelolaan sumber daya energi	Infrastruktur Ekonomi (PP2)	Bhakti 4 - Jatim Akses	Penanganan Banjir	Pemantauan Banjir, Operasi dan Pemeliharaan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	PAD	1.312.182.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	
	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	Peningkatan kemandirian pangan, dam pengelolaan sumber daya energi	Infrastruktur Ekonomi (PP2)	Bhakti 4 - Jatim Akses	Penanganan Banjir	Pemantauan Banjir, Operasi dan Pemeliharaan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	PAD	501.645.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	NAWABHAKTI	PROGRAM ICON	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SUMBER PENDANAAN	PAGU ANGGARAN RANWAL	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
	dan Pelayanan Dasar (PN5)												
	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	Peningkatan kemandirian pangan, dan pengelolaan sumber daya energi	Infrastruktur Ekonomi (PP2)	Bhakti 4 - Jatim Akses	Penanganan Banjir	Pemantauan Banjir, Operasi dan Pemeliharaan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	Normalisasi/ Restorasi Sungai	PAD	27.361.313.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	
	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	Peningkatan kemandirian pangan, dan pengelolaan sumber daya energi	Infrastruktur Ekonomi (PP2)	Bhakti 4 - Jatim Akses	Penanganan Banjir	Pemantauan Banjir, Operasi dan Pemeliharaan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	PAD	2.224.814.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	
	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	Peningkatan kemandirian pangan, dan pengelolaan sumber daya energi	Infrastruktur Ekonomi (PP2)	Bhakti 4 - Jatim Akses	Penanganan Banjir	Pemantauan Banjir, Operasi dan Pemeliharaan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	PAD	2.508.224.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	
	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	Peningkatan kemandirian pangan, dan pengelolaan sumber daya energi	Infrastruktur Ekonomi (PP2)	Bhakti 4 - Jatim Akses	Penanganan Banjir	Pemantauan Banjir, Operasi dan Pemeliharaan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	PAD	4.191.112.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	
	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	Peningkatan kemandirian pangan, dan pengelolaan sumber daya energi	Infrastruktur Ekonomi (PP2)	Bhakti 4 - Jatim Akses	Penanganan Banjir	Pemantauan Banjir, Operasi dan Pemeliharaan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	PAD	2.174.154.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	
	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	Peningkatan kemandirian pangan, dan pengelolaan sumber daya energi	Infrastruktur Ekonomi (PP2)	Bhakti 4 - Jatim Akses	Penanganan Banjir	Pemantauan Banjir, Operasi dan Pemeliharaan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	PAD	2.295.749.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	
	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	Peningkatan kemandirian pangan, dan pengelolaan sumber daya energi	Infrastruktur Ekonomi (PP2)	Bhakti 4 - Jatim Akses	Penanganan Banjir	Pemantauan Banjir, Operasi dan Pemeliharaan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	Operasi dan Pemeliharaan Danau	PAD	1.003.290.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	
	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	Peningkatan kemandirian pangan, dan pengelolaan sumber daya energi	Infrastruktur Ekonomi (PP2)	Bhakti 4 - Jatim Akses	Penanganan Banjir	Pemantauan Banjir, Operasi dan Pemeliharaan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	PAD	11.756.182.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	
	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	Peningkatan kemandirian pangan, dan pengelolaan sumber daya energi	Infrastruktur Ekonomi (PP2)	Bhakti 4 - Jatim Akses	Penanganan Banjir	Pemantauan Banjir, Operasi dan Pemeliharaan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	PAD	1.029.139.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	
	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang	Bhakti - 4 : Jatim Akses.	Penanganan Jalan dan Jembatan	Rekonstruksi Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rekonstruksi Jalan	PAD	Rp 3,239,500,000.00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang	Bhakti - 4 : Jatim Akses.	Penanganan Jalan dan Jembatan	Pemeliharaan Berkala Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Berkala Jalan	PAD	Rp 2,387,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang	Bhakti - 4 : Jatim Akses.	Penanganan Jalan dan Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	PAD	Rp 36,407,805,956.00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang	Bhakti - 4 : Jatim Akses.	Penanganan Jalan dan Jembatan	Penggantian Jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penggantian Jembatan	PAD	Rp 3,720,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang	Bhakti - 4 : Jatim Akses.	Penanganan Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi Jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi Jembatan	PAD	Rp 3,921,500,000.00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang	Bhakti - 4 : Jatim Akses.	Penanganan Jalan dan Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jembatan	PAD	Rp 7,848,884,476.00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Pembangunan Wilayah Jawa-Bali (PP2)	Bhakti - 4 : Jatim Akses.	Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	Pembangunan infrastruktur untuk penanganan kawasan kumuh	Program Kawasan Permukiman	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	PAD	106.270.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	NAWABHAKTI	PROGRAM ICON	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SUMBER PENDANAAN	PAGU ANGGARAN RANWAL	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing Ketenagakerjaan serta pengentasan Kemiskinan	Pengentasan Kemiskinan (PP6)					Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peromajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	PAD	470.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	
									Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Perumahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	PAD	6.803.730.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	
	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing Ketenagakerjaan serta pengentasan Kemiskinan	Pengentasan Kemiskinan (PP6)	Bhakti - 4 : Jatim Akses.	Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu)	Laporan pelaksanaan pembangunan RUTILAHU	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	PAD	40.600.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	
	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang	Bhakti - 4 : Jatim Akses.	Pemenuhan Alat Keselamatan Jalan dengan teknologi terbaru	Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	PAD	Rp 10.901.654.197,00	Dinas Perhubungan	
	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang	Bhakti - 4 : Jatim Akses.	<del>Pengembangan ALAJ (Alat Keselamatan Jalan) dengan teknologi terbaru</del>	<del>Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan</del>	<del>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</del>				Rp -	Dinas Perhubungan	Dihapus karena kurangnya anggaran
	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang	Bhakti - 4 : Jatim Akses.	Peningkatan Keselamatan di Perlintasan Sebidang	Pemeliharaan sarana prasarana keselamatan di perintasan sebidang	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	PAD	Rp 1.567.147.574,00	Dinas Perhubungan	
	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang	Bhakti - 4 : Jatim Akses.	Mudik Balik Gratis	Mudik Balik Gratis Moda Bus	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD	Rp 4.150.000.000,00	Dinas Perhubungan	
	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang	Bhakti - 4 : Jatim Akses.	<del>Mudik Balik Gratis</del>	<del>Mudik Balik Gratis Moda Kapal Aps</del>	<del>Program Pengelolaan Perkeretaapian</del>	<del>Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian</del>	<del>Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian</del>	PAD	Rp -	Dinas Perhubungan	
	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang	Bhakti - 4 : Jatim Akses.	Mudik Balik Gratis Moda Kapal Laut	Mudik Balik Gratis Moda Kapal Laut	Program Pengelolaan Pelayaran	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	PAD	Rp 1.200.000.000,00	Dinas Perhubungan	
	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang	Bhakti - 4 : Jatim Akses.	<del>Mudik Balik Gratis</del>	<del>Mudik Balik Gratis Sepeda Motor</del>	<del>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</del>	<del>Pelaksanaan Manajemen dan Kelayakan Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</del>	<del>Penetapan Manajemen dan Kelayakan Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</del>	PAD	Rp -	Dinas Perhubungan	
	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang	Bhakti - 4 : Jatim Akses.	Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut (Pelabuhan Pengumpulan Regional)	Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut (Pelabuhan Pengumpulan Regional)	Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional	Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Regional	PAD	Rp 2.200.000.000,00	Dinas Perhubungan	
	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang	Bhakti - 4 : Jatim Akses.	Pembangunan Kapal Perintis dan Subsidi Operasional Kapal di Kepulauan Madura	Subsidi Operasional Kapal	Program Pengelolaan Pelayaran	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	PAD	Rp 15.000.000.000,00	Dinas Perhubungan	
	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang	Bhakti - 4 : Jatim Akses.	Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan	Peningkatan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan	Program Pengelolaan Pelayaran	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD	Rp 6.000.000.000,00	Dinas Perhubungan	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	NAWABHAKTI	PROGRAM ICON	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SUMBER PENDANAAN	PAGU ANGGARAN RANWAL	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		peningkatan layanan infrastruktur						Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					
	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang	Bhakti - 4 : Jatim Akses.	Pembangunan dan Pengembangan Bandara	Pengelolaan Bandara Abd Saleh	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD	Rp -	Dinas Perhubungan	
	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang	Bhakti - 4 : Jatim Akses.	Pembangunan dan Pengembangan Bandara	Pengelolaan Bandara Abd Saleh	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD	Rp 915,000,000.00	Dinas Perhubungan	
	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang	Bhakti - 4 : Jatim Akses.	Pembangunan dan Pengembangan Bandara	Pengelolaan Bandara Abd Saleh	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PAD	Rp 231,000,000.00	Dinas Perhubungan	
	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang	Bhakti - 4 : Jatim Akses.	Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B	Peningkatan Pelayanan Terminal Tipe B	Program Penyelenggaraan Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Pembangunan Gedung Terminal	PAD	Rp -	Dinas Perhubungan	
	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang	Bhakti - 4 : Jatim Akses.	Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B	Peningkatan Pelayanan Terminal Tipe B	Program Penyelenggaraan Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	PAD	Rp 1,170,000,000.00	Dinas Perhubungan	
	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang	Bhakti - 4 : Jatim Akses.	Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B	Peningkatan Pelayanan Terminal Tipe B	Program Penyelenggaraan Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	PAD	Rp 10,750,000,000.00	Dinas Perhubungan	
					Peningkatan Rasio Elektrifikasi	Pembangunan Instalasi Rumah Sambungan Rumah (IR SR) bagi masyarakat miskin	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	PAD	1.000.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PNS)	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1)	Bhakti - 4 : Jatim Akses.	Pembangunan Jaringan Back Bone	Memfasilitasi bandwidth utama dan backup dalam rangka menghubungkan Setiap Perangkat Daerah dengan Jaringan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	PAD	1.300.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing Ketenagakerjaan serta pengentasan Kemiskinan	Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	<b>Bhakti - 5 Jatim Berkah.</b> "Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas."	<i>Vocational training</i> pasca kepelugangan PMI (Pekerja Migran Indonesia) Wanita		Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelindungan PMI (Pria dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	PAD	455.820.950	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
							Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelindungan PMI (Pria dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	PAD	149.452.500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
												Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
										APBD	392.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga DP3AK	
						Penguatan dan Peningkatan kinerja Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak		Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	APBD	330.000.000	DP3AK	
						Peningkatan kapasitas forum anak dalam rangka pemenuhan hak anak		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Perweda Layanan	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	APBD	330.000.000	DP3AK	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	NAWABHAKTI	PROGRAM ICON	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SUMBER PENDANAAN	PAGU ANGGARAN RANWAL	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
								Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi					
						Penguatan SDM terkait perlindungan anak		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	APBD	475.000.000	DP3AK	
						Penguatan jejaring dalam rangka penanganan masalah perempuan dan anak		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	APBD	115.000.000	DP3AK	
						Layanan terhadap anak korban kekerasan		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	APBD	451.000.000	DP3AK	
								Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	APBD	50.000.000	DP3AK	
								Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	APBD	25.000.000	DP3AK	
						Peri Penjaga Ibu : Tunjangan kehormatan bagi Imam Masjid di Kampung, Pesisir dan Pulau Terluar	Program Kesejahteraan Rakyat	Facilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Facilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	PAD	30.000.000.000	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat	
						Tunjangan Kehormatan untuk Hafidz Hafidzoh	Program Kesejahteraan Rakyat	Facilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Facilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	PAD	2.125.000.000	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat	
						Bantuan Beasiswa S1 bagi Guru Madrasah Diniyah	Program Kesejahteraan Rakyat	Facilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Pengelolaan sarana dan Prasaran Spiritual	PAD	4.950.000.000	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat	
						Mahasiswa S2 bagi Guru Madrasah Diniyah	Program Kesejahteraan Rakyat	Facilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Pengelolaan sarana dan Prasaran Spiritual	PAD	5.000.000.000	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat	
						Tunjangan Kehormatan bagi penjaga Situs Budaya	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	PAD	2.500.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
						Tunjangan perintis kemerdekaan	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan potensi sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	PAD	140.000.000	Dinas Sosial	
						-						Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
						-						Dinas Perkebunan	
						-						Dinas Perernakan	
						-						Dinas Peternakan	
						-						Dinas Kelautan dan Perikanan	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	NAWABHAKTI	PROGRAM ICON	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SUMBER PENDANAAN	PAGU ANGGARAN RANWAL	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
												Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Penguatan SDM Pertanian dan Capoktan						Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
												Dinas Perkebunan	
												Dinas Perkebunan	
												Dinas Peternakan	
												Dinas Peternakan	
						Pelatihan bagi pembudidaya ikan	#REF!	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	PAD	439.021.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Pelatihan bagi nelayan	#REF!	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	PAD	534.451.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Pelatihan bagi pengolah dan pemasar	#REF!	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	PAD	548.335.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Pelatihan bagi masyarakat pesisir	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	PAD	449.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
					Pengembangan kawasan pertanian terpadu	Bantuan sarana produksi dan benih ikan budidaya laut	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	PAD	721.500.938,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Bantuan prasarana berupa kolam ikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	PAD	2.712.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						penyempurnaan sarana prasarana UPT dan Instalasi	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	PAD	396.495.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Bantuan sarana produksi dan benih ikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	PAD	10.696.121.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Penyempurnaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	PAD	83.421.268.537,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Pengembangan produk pangan berbasis agro						Dinas Koperasi dan UKM	
												Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan	
												Dinas Peternakan	
												Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Pembinaan sertifikasi produk dan pemberian sarana peningkatan mutu produk	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	PAD	1.007.267.210,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Diversifikasi produk olahan kelautan dan perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	PAD	4.110.207.454,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Ketahanan Pangan						Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
												Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	NAWABHAKTI	PROGRAM ICON	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SUMBER PENDANAAN	PAGU ANGGARAN RANWAL	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
												Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
						Program petik olah kemas jual		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besa	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	PAD	2.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Perkemah Kampanve GEMARIKAN, HARKANAS, Pemilihan Duta GEMARIKAN, Lomba Masak Ikan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD	3.250.048.550,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Promosi Produk di Fasilitas Umum, Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam dan Luar Provinsi, Bazar Produk Kelautan dan Perikanan, Gelar Pasar Murah, Buyer Meet Seller	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD	3.248.121.200,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Pengembangan Sistem informasi Manajemen Logistik Ikan melalui fish info	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD	1.297.089.561,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Budidaya, Penanganan Panen dan Pasca Panen Tanaman Kopi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	PAD	1.500.000.000	Dinas Perkebunan	
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		900.000.000		
						Pengelolaan Hutan Lestari							Dinas Kehutanan
						Akses Kelola/Pemanfaatan Hutan untuk Masyarakat / Social Forestry							Dinas Kehutanan
													Dinas Kehutanan
						High Conservation Value (HCV)							Dinas Kehutanan
						DAS Berkualitas							Dinas Kehutanan
						Asuransi Petani							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
													Dinas Peternakan
						Fasilitasi Pendaftaran dan Pemanfaatan Asuransi Nelayan	Program pengelolaan perikanan tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	PAD	1.300.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Bhakti - 7 Jatin Berdaya. "Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa."	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	APBD		Dinas Koperasi dan UKM	
													Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						One Village One Product One Corporate							Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						One Pesantren One Product	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	APBD		Dinas Koperasi dan UKM,	
						Pemberdayaan Santri, Pesantren dan alumni pondok pesantren untuk peningkatan kesejahteraan	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	APBD		Dinas Koperasi dan UKM,	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	NAWABHAKTI	PROGRAM ICON	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SUMBER PENDANAAN	PAGU ANGGARAN RANWAL	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
								Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	APBD			
						Pemberdayaan Santri, Pesantren dan alumni pondok pesantren untuk peningkatan kesejahteraan	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	APBD		Dinas Koperasi dan UKM,	
									Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	APBD			
												Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
						Revitalisasi Koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	APBD		Dinas Koperasi dan UKM	
									Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	APBD			
						Menyapkan agar koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	APBD		Dinas Koperasi dan UKM	
					Pengembangan Koperasi	Mengembangkan koperasi dengan mempermudah akses pembiayaan, memperluas akses pasar, dan pengembangan SDM	Program Pendidikan dan Latihan Perkerjasama	Pendidikan dan Latihan Perkerjasama bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkerjasama serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	APBD		Dinas Koperasi dan UKM,	
									Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	APBD			
						Mengembangkan koperasi dengan mempermudah akses pembiayaan, memperluas akses pasar, dan pengembangan SDM	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	APBD		Dinas Koperasi dan UKM,	
									Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	APBD			
					Perdagangan Antar Pulau	Fasilitasi Promosi dan Misi Dagang	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	PAD	12.200.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
					Kemitraan UKM dan BUMDesa	Memfasilitasi pemasaran UKM dan BUMDesa	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	APBD		Dinas Koperasi dan UKM	
	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing Ketenagakerjaan serta pengentasan Kemiskinan	Pengentasan Kemiskinan (PP6)	Bhakti - 7 Jatim Berdaya. "Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa."	Pemberdayaan BUMDesa,	Pemberian bantuan modal kepada BUMDesa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Peraturan BUM Desa Kabupaten/ Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	PAD	1.400.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing Ketenagakerjaan serta pengentasan Kemiskinan	Pengentasan Kemiskinan (PP6)	Bhakti - 7 Jatim Berdaya. "Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa."	SINANDO (Sinau nang Ndeso)	Pemberian bantuan kepada Desa Mandiri dalam upaya Pengembangan desa tematik dengan economic branding untuk menggerakkan kembali perekonomian di desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pelaksanaan Pengusan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	PAD	1.150.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	NAWABHAKTI	PROGRAM ICON	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMEKLATUR	KEGIATAN NOMEKLATUR	SUB KEGIATAN NOMEKLATUR	SUMBER PENDANAAN	PAGU ANGGARAN RANWAL	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi (PP5)	Bhakti - 7 Jatim Berdaya "Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa."	SINANDO (Sinawang Ndeso)	Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	PAD	500.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8)	Bhakti - 7 Jatim Berdaya "Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa."	Restorasi Desa	pemberdayaan pemerintah Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Facilitasi Kabupaten/ Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	PAD	1.387.315.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
						Penguatan lembaga kemasyarakatan desa/ kel.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Facilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	PAD	1.190.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
						Peningkatan kapasitas aparatur pedes	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	PAD	400.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
						Facilitasi perencanaan pembangunan desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Facilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	PAD	130.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
						Pembinaan Pengelolaan Aset Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Facilitasi Pengelolaan Aset Desa	PAD	500.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
						pemberdayaan pemerintah Desa	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Facilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Facilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	PAD	500.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
						Pemuda Wirusaha						Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
						Pengawasan						Inspektorat	
						Bhakti - 8 : Jatim : Jatim Amanah. "Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi."						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
						Bhakti - 8 : Jatim : Jatim Amanah. "Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi."						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
						Bhakti - 8 : Jatim : Jatim Amanah. "Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi."						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
						Bhakti - 8 : Jatim : Jatim Amanah. "Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi."	Pengolahan system informasi data dan pengadaan ASN	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi dan Facilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	APBD	13.303.096.500	Badan Kepegawaian Daerah	
									Pengelolaan Sistem Informasi	APBD	23.489.000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Bhakti - 8 : Jatim : Jatim Amanah.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	PAD	368.373.000	Badan Pendapatan	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	NAWABHAKTI	PROGRAM ICON	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SUMBER PENDANAAN	PAGU ANGGARAN RANWAL	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				"Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi."				Keuangan Daerah				Daerah	
				Bhakti - 8 : Jatim : Jatim Amanah. "Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi."		Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	PAD	973.680.000	Badan Pendapatan Daerah	
									Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	PAD	2.083.257.000	Badan Pendapatan Daerah	
									Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	PAD	5.371.456.000	Badan Pendapatan Daerah	
									Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	PAD	550.182.000	Badan Pendapatan Daerah	
									Penetapan Wajib Pajak Daerah	PAD	186.684.000	Badan Pendapatan Daerah	
									Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	PAD	882.279.000	Badan Pendapatan Daerah	
									Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	PAD	55.853.000	Badan Pendapatan Daerah	
									Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PAD	826.597.000	Badan Pendapatan Daerah	
									Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	PAD	241.415.000	Badan Pendapatan Daerah	
									Penvuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PAD	3.436.915.000	Badan Pendapatan Daerah	
									Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PAD	415.520.000	Badan Pendapatan Daerah	
									Penagihan Pajak Daerah	PAD	1.365.900.000	Badan Pendapatan Daerah	
				Bhakti - 8 : Jatim : Jatim Amanah. "Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi."	Dokumen Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	PAD	215.641.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
				Bhakti - 8 : Jatim : Jatim Amanah. "Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi."		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	PAD	241.790.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
				Bhakti - 8 : Jatim : Jatim Amanah. "Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi."		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	PAD	155.360.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
				Bhakti - 8 : Jatim : Jatim Amanah. "Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi."		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	PAD	148.930.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
				Bhakti - 8 : Jatim : Jatim Amanah. "Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi."		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	PAD	238.378.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
				Bhakti - 8 : Jatim : Jatim Amanah. "Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi."		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	PAD	228.946.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	NAWAHAKTI	PROGRAM ICON	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SUMBER PENDANAAN	PAGU ANGGARAN RANWAL	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				Bhakti - 8 : Jatim : Jatim Amanah. "Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi."	Dokumen Perencanaan	Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, serta penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Provinsi	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	PAD	1.600.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Bhakti - 8 : Jatim : Jatim Amanah. "Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi."	Dokumen Perencanaan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPD, RKKPD, RKKPD Perubahan)	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	PAD	1.479.552.514	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Bhakti - 8 : Jatim : Jatim Amanah. "Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi."	Dokumen Perencanaan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPD, RKKPD, RKKPD Perubahan)	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pelaksanaan Konsultasi Publik	PAD	1.996.406.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Bhakti - 8 : Jatim : Jatim Amanah. "Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi."	Dokumen Perencanaan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPD, RKKPD, RKKPD Perubahan)	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Pelaksanaan Forum Peringkat Daerah/ Lintas Peringkat Daerah	PAD	22.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Bhakti - 8 : Jatim : Jatim Amanah. "Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi."	Dokumen Perencanaan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPD, RKKPD, RKKPD Perubahan)	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	PAD	1.734.577.600	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Bhakti - 8 : Jatim : Jatim Amanah. "Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi."	Dokumen Perencanaan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPD, RKKPD, RKKPD Perubahan)	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	PAD	2.526.867.602	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Bhakti - 8 : Jatim : Jatim Amanah. "Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi."	Dokumen Perencanaan		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	PAD	9.202.895.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Bhakti - 8 : Jatim : Jatim Amanah. "Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi."	Dokumen Perencanaan		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	PAD	210.537.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Bhakti - 8 : Jatim : Jatim Amanah. "Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi."	Dokumen Perencanaan		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD	3.334.933.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Bhakti - 8 : Jatim : Jatim Amanah. "Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi."	Dokumen Perencanaan		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Facilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	PAD	3.519.763.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	Peningkatan kemandirian pangan, dan pengelolaan sumber daya energi	Transformasi Digital (PP5)	Bhakti - 8 : Jatim : Jatim Amanah. "Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi."	Aplikasi E Government berbasis CETIAR (Aplikasi CETIAR)	Pengembangan aplikasi sesuai dengan proses bisnis SPBE	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	PAD	1.550.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
								Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		PAD	100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	Peningkatan kemandirian pangan, dan pengelolaan sumber daya energi	Transformasi Digital (PP5)	Bhakti - 8 : Jatim : Jatim Amanah. "Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi."	Program yang mengelola big data OPD, ASN, dan penanganan complain terpadu (complaint handling system)	SATU DATA JAWA TIMUR	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Pengembangan Infrastruktur	PAD	175.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	Peningkatan kemandirian pangan, dan pengelolaan sumber daya energi	Transformasi Digital (PP5)	Bhakti - 8 : Jatim : Jatim Amanah. "Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi."		Pengembangan Sistem Open Government sebagai Decision Support Systems	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	PAD	1.000.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	NAWABHAKTI	PROGRAM ICON	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SUMBER PENDANAAN	PAGU ANGGARAN RANWAL	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				Anti Korupsi.²									
										PAD		Badan Penelitian dan Pengembangan	
						Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Penyusunan LPPD Provinsi Jawa Timur	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Pelaksanaan Tugas Pemerintah	Pengelolaan Administrasi Kebijakan	PAD	9.951.334.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
						Fasilitasi Layanan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Pelaksanaan Tugas Pemerintah	Fasilitasi Penataan Wilayah	PAD	2.542.858.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
						LKPJ Gubernur Jatim dan SPM Provinsi Jawa Timur	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	PAD	6.781.671.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
						Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintahan	PAD	1.798.898.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
					Pelayanan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Badan Penghubung	Program Pelayanan Penghubung	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	APBD	800.000.000	Badan Penghubung Daerah	
									Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	APBD	1.574.037.200	Badan Penghubung Daerah	
									Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	APBD	850.000.000	Badan Penghubung Daerah	
									Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	APBD	1.500.000.000	Badan Penghubung Daerah	
							Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	APBD	3.336.848.444	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
									Pembinaan, Pengeordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	APBD	490.452.774	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
									Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	APBD	568.726.870	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
									Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	APBD	95.921.637	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
									Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	APBD	684.377.071	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
									Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	APBD	309.534.361	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
									Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	APBD	42.642.484.939	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
									Pembinaan, Pengeordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan	APBD	1.018.061.916	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
					KAKANDA	Sosialisasi Perda dan Pergub serta pembentukan dan pemberdayaan KAKANDA	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	APBD	550.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Program Penataan Organisasi	Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	APBD	1.250.000.000	Biro Organisasi	
						Perluasan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM			Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	APBD			

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	NAWABHAKTI	PROGRAM ICON	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SUMBER PENDANAAN	PAGU ANGGARAN RANWAL	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						Optimalisasi penerapan SuKMa-e Jatim			Facilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	APBD	1.500.000.000		
						Peningkatan Kualitas Implementasi SAKIP Provinsi Jawa Timur			Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	APBD	1.750.000.000		
						Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan Organisasi Bantuan Hukum						Biro Hukum	
						Program inisiasi pendirian dan pengembangan organisasi bantuan hukum (OBI), bantuan hukum bagi orang miskin dan kelompok marjinal, serta pemajuan HAM							
				Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Penataan Lingkungan dan Sumber Daya Alam	rehabilitasi mangrove dan terumbu karang di zona inti, zona penyangga, pemanfaatan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	PAD	1.379.838.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	
						pertemuan pembinaan mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	PAD	534.011.900,00	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	
						bantuan sarana prasarana pemberdayaan pesisir dan pulau- pulau kecil, garam rakyat.	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	PAD	2.557.180.500,00	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	
						pertemuan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	PAD	1.800.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	
						pertemuan dan fasilitasi sarana pengelolaan sampah plastik di wilayah pesisir dan laut	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	PAD	813.382.940,00	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	
						Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	PAD	125.547.774,00	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	
						Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan budidaya laut	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut sampai dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	PAD	620.306.555,00	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	
						Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran diatas 10-30 GT	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	PAD	1.210.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	
						Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	PAD	429.241.425,00	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	
						Penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	PAD	300.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	
						Penerbitan rekomendasi persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	PAD	243.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	NAWABHAKTI	PROGRAM ICON	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SUMBER PENDANAAN	PAGU ANGGARAN RANWAL	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
								sampai dengan 30 GT					
						Penerbitan rekomendasi persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	PAD	268.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	
						Penerbitan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	PAD	938.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	
						Penerbitan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	PAD	688.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	
						Penerbitan rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	PAD	840.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	
						Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	PAD	272.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	
						Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	PAD	100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	
						Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD	1.602.230.825,00	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	
						Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD	5.917.835.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	
						Kegiatan pengawasan pada pemanfaatan Ruang Laut	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	PAD	8.385.107.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	
						Kegiatan pengawasan pada usaha perikanan tangkap di laut	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	PAD	400.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	
						Kegiatan pengawasan pada usaha perikanan budidaya di laut	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	PAD	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	
						Pertemuan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan, Penumbuhkembangan SDM Kelompok masyarakat pengawas	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) 450 orang	PAD	220.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	
						Kegiatan pengawasan pada usaha perikanan tangkap di PUD	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	PAD	165.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	
						Kegiatan pengawasan pada usaha perikanan budidaya di PUD	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam	PAD	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	NAWABHAKTI	PROGRAM ICON	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SUMBER PENDANAAN	PAGU ANGGARAN RANWAL	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
							PERIKANAN	dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya				
						Kegiatan pengawasan pada usaha pengolahan dan pemasaran	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD	65.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	
	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	Peningkatan ketahanan Bencana dan kualitas lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1)	Bhakti - 9 : Jatim Harmoni. "Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup."	Pengawasan serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Adopsi Sungai Brantas)	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	PAD	900.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	Peningkatan ketahanan Bencana dan kualitas lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1)	Bhakti - 9 : Jatim Harmoni. "Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup."	Pengawasan serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Adopsi Sungai Brantas)	Pengendalian PencemaranLingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	PAD	3.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	Peningkatan ketahanan Bencana dan kualitas lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1)	Bhakti - 9 : Jatim Harmoni. "Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup."	Pengawasan serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Adopsi Sungai Brantas)	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	PAD	685.404.000	Dinas Lingkungan Hidup	
	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	Peningkatan ketahanan Bencana dan kualitas lingkungan Hidup	Pembangunan Rendah Karbon (PP3)	Bhakti - 9 : Jatim Harmoni. "Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup."	Pengawasan serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Adopsi Sungai Brantas)	Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	PAD	600.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	Peningkatan ketahanan Bencana dan kualitas lingkungan Hidup	Pembangunan Rendah Karbon (PP3)	Bhakti - 9 : Jatim Harmoni. "Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup."	Pengawasan serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Adopsi Sungai Brantas)	Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	PAD	200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	Peningkatan ketahanan Bencana dan kualitas lingkungan Hidup	Pembangunan Rendah Karbon (PP3)	Bhakti - 9 : Jatim Harmoni. "Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup."	Penataan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam	Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Program pengelolaan keanekaragaman Hayati (kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	PAD	250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	Peningkatan ketahanan Bencana dan kualitas lingkungan Hidup	Pembangunan Rendah Karbon (PP3)	Bhakti - 9 : Jatim Harmoni. "Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup."	Penataan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam	Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Program pengelolaan keanekaragaman Hayati (kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	PAD	475.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	Peningkatan ketahanan Bencana dan kualitas lingkungan Hidup	Pembangunan Rendah Karbon (PP3)	Bhakti - 9 : Jatim Harmoni. "Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup."	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Peningkatan pengelolaan limbah B3	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	PAD	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	NAWABHAKTI	PROGRAM ICON	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SUMBER PENDANAAN	PAGU ANGGARAN RANWAL	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				Hidup.*									
	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	Peningkatan ketahanan Bencana dan kualitas lingkungan Hidup	Pembangunan Rendah Karbon (PP3)	Bhakti - 9: Jatim Harmoni. "Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup."	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Peningkatan pengelolaan limbah B3	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	PAD	377.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	Peningkatan ketahanan Bencana dan kualitas lingkungan Hidup	Pembangunan Rendah Karbon (PP3)	Bhakti - 9: Jatim Harmoni. "Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup."	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Peningkatan pengelolaan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Penanganan Sampah di TPA/TPST regional	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	PAD	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	Peningkatan ketahanan Bencana dan kualitas lingkungan Hidup	Pembangunan Rendah Karbon (PP3)	Bhakti - 9: Jatim Harmoni. "Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup."	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Peningkatan pengelolaan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Penanganan Sampah di TPA/TPST regional	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	PAD	463.400.000	Dinas Lingkungan Hidup	
	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	Peningkatan ketahanan Bencana dan kualitas lingkungan Hidup	Pembangunan Rendah Karbon (PP3)	Bhakti - 9: Jatim Harmoni. "Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup."	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Peningkatan pengelolaan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Penanganan Sampah di TPA/TPST regional	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	PAD	1.092.780.000	Dinas Lingkungan Hidup	
	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	Peningkatan ketahanan Bencana dan kualitas lingkungan Hidup	Pembangunan Rendah Karbon (PP3)	Bhakti - 9: Jatim Harmoni. "Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup."	Penataan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan di bidang lingkungan hidup	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLIH)	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLIH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLIH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	PAD	400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	Peningkatan ketahanan Bencana dan kualitas lingkungan Hidup	Pembangunan Rendah Karbon (PP3)	Bhakti - 9: Jatim Harmoni. "Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup."	Penataan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan di bidang lingkungan hidup	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan Hidup untuk masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	PAD	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	Peningkatan ketahanan Bencana dan kualitas lingkungan Hidup	Pembangunan Rendah Karbon (PP3)	Bhakti - 9: Jatim Harmoni. "Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup."	Penataan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan di bidang lingkungan hidup	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLIH) Provinsi	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLIH Provinsi	PAD	250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	Peningkatan ketahanan Bencana dan kualitas lingkungan Hidup	Pembangunan Rendah Karbon (PP3)	Bhakti - 9: Jatim Harmoni. "Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup."	Penataan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan di bidang lingkungan hidup	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLIH) Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	PAD	250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	Peningkatan ketahanan Bencana dan kualitas lingkungan Hidup	Pembangunan Rendah Karbon (PP3)	Bhakti - 9: Jatim Harmoni. "Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup."	Penataan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan di bidang lingkungan hidup	Program Penghargaan Masyarakat Hidup untuk masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	PAD	354.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	NAWABHAKTI	PROGRAM ICON	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SUMBER PENDANAAN	PAGU ANGGARAN RANWAL	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				Lingkungan Hidup.									
	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	Peningkatan ketahanan Bencana dan kualitas lingkungan Hidup	Pembangunan Rendah Karbon (PP3)	Bhakti - 9 :Jatim Harmoni. "Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup."	Penataan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam	Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPIPD/RPJMD	PAD	228.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	Peningkatan ketahanan Bencana dan kualitas lingkungan Hidup	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2)	Bhakti - 9 :Jatim Harmoni. "Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup."	Desa Tangguh Bencana (Destana)	Desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak dampak bencana yang merugikan.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	PAD	6.500.000.000	Badan Penanggulangan Bencana	
				Bhakti - 9 :Jatim Harmoni. "Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup."	Peringatan Dini Bencana (Early Warning System)	Serangkaian peralatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	PAD	3.250.000.000	Badan Penanggulangan Bencana	
				Bhakti - 9 :Jatim Harmoni. "Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup."	Pemenuhan Kebutuhan Dasar pada saat Darurat Bencana	Pemenuhan bantuan untuk korban terdampak bencana yang terdiri dari penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, serta pelayanan kesehatan.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	PAD	6.400.000.000	Badan Penanggulangan Bencana	
									Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	PAD		Badan Penanggulangan Bencana	
									Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	PAD	7.900.000.000	Badan Penanggulangan Bencana	
				Bhakti - 9 :Jatim Harmoni. "Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup."	Pemulihan Sarana Prasarana Pasca Bencana	Pemenuhan bantuan untuk korban terdampak bencana yang terdiri dari penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, serta pelayanan kesehatan.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penanganan Pascabencana Provinsi	PAD	10.055.000.000	Badan Penanggulangan Bencana	
					Kampung Siaga Bencana (KSB) Berdaya							Dinas Sosial	
					Karang Taruna siaga bencana berbasis budaya (KANCANA BERDAYA)							Dinas Sosial	
					ESDM berwawasan lingkungan	Pembangunan Energi Baru Terbarukan	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	PAD	20.000.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
					Intergrasi Perpusda - Museum - Galeri Seni	mengintegrasikan antara Museum, galeri seni dan Perpustakaan daerah	Program Pengelolaan Pemuseuman	Pengelolaan Museum Provinsi	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	APBD		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,	
					Museum Etnografi Festival, Pemilihan Data Museum, Gelar WBTB (Warisan Budaya Tak Benda)		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum Provinsi	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	APBD		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,	
					Pameran Seni Rupa (Aktivasi Galeri Prabangkara)		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi	Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan obyek pemajuan tradisi budaya	APBD		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,	
												Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
												Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	NAWABHAKTI	PROGRAM ICON	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SUMBER PENDANAAN	PAGU ANGGARAN RANWAL	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
					Inventarisasi data kesenian tradisional dan adat budaya lokal	Rumah Data Kebudayaan Jawa Timur	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan	APBD		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
						Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Jawa Timur	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan	APBD		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
						Pendokumentasian Seni Budaya Jawa Timur (yang telah terdaftar dalam WBTB)	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan obyek pemajuan tradisi budaya	APBD		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
						Pendokumentasian Pergelaran Kesenian di Taman Budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan obyek pemajuan tradisi budaya	APBD		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
					Eco tourism (Pengembangan wisata berbasis lingkungan dan partisipasi masyarakat)	Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	APBD		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
						East Java Tourism Award (Destinasi)	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	APBD		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
						East Java Tourism Award Industri Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	APBD		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
						Festival Makanan Khas Jawa Timur	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	APBD		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
						Sertifikasi Kompetensi SDM PAREKRAF	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	APBD		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Konsolidasi Demokrasi (PP1)	Bhakti - 9: Jatim Harmoni. "Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup."	KOPLABORASI (Ngopi dan Kolaborasi Serap Aspirasi) Bersama Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.	Menjaring Aspirasi Masyarakat melalui kegiatan Ngopi dan Kolaborasi Serap Aspirasi bersama Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	PAD	1.032.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
						Penataan Lingkungan dan Sumber Daya Alam							Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Halal tourism	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	APBD		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
						Pengembangan Kompetensi dan Kreatifitas SDM Ekonomi Kreatif Santri dibidang Seni	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	APBD		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
						Pameran Wisata Halal	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	APBD				
						Pengakuan masyarakat hukum adat menuju desa adat	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	APBD		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
						Pengakuan masyarakat hukum adat menuju desa adat	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	PAD	125.000.000	Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa		

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	NAWABHAKTI	PROGRAM ICON	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SUMBER PENDANAAN	PAGU ANGGARAN RANWAL	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
								Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
					Festival Desa	Festival Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posvandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	PAD	300.000.000	Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa	
						Pendampingan Desa Wisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	APBD		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
						Festival Dewi Cemara	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	APBD		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
						Penghargaan bagi para pelaku olahraga yang berprestasi Nasional dan Internasional						Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					JARAK (Jatim Anti Radikal)	Pembentukan dan Pelatihan Tim Terpadu Penyuluh Anti Radikalisme yang terdiri dari Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Penyuluh Agama seluruh Kab/Kota di Jawa Timur. Kegiatan ini memberikan pembekalan tentang cara deteksi, mengenali, mencegah, kontra radikal, dan deradikalisasi kepada seluruh anggota tim tersebut serta membentuk komunikasi dan sinergitas yang solid di seluruh wilayah Jawa Timur	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	APBD	850.000.000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	